



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 045.4/854/2009 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

### BAB II

#### PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

##### Pasal 2

Pedoman Klasifikasi Arsip di Pemerintah Daerah meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang tercerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

##### Pasal 3

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Demak Nomor 045.4/854/2009 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Maret 2015  
BUPATI DEMAK,  
ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 8

**SESUAI ASLINYA  
MENGETAHUI :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650330 199603 1 001**

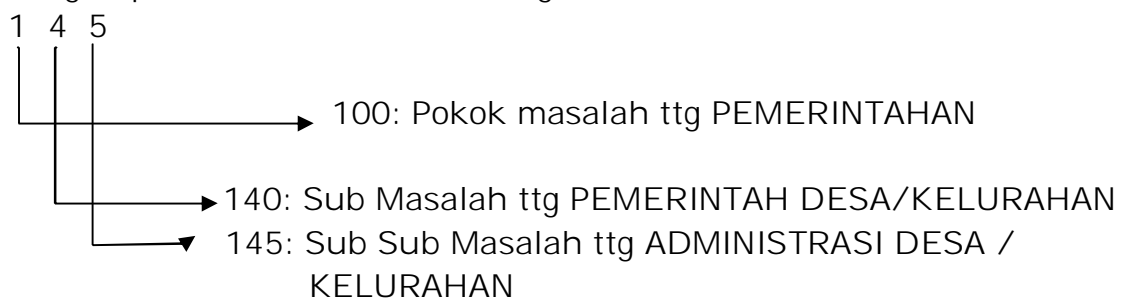
NO	JABATAN	PARAF
1	Plt. SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KABAG HUKUM	
4	KA KPA	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

1. Klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang, dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut :



4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitatif dan substantif SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, adalah

**000 UMUM**

010 URUSAN DALAM

020 BARANG DAN JASA

030 KEKAYAAN DAERAH

040 PERPUSTAKAAN/ DOKUMEN/KEARSIPAN/ SANDI

050 PERENCANAAN DAN EVALUASI meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes

060 ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

080 KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI

090 PERJALANAN DINAS

**100 PEMERINTAHAN**

110 PEMERINTAH PUSAT

120 PEMERINTAH PROPINSI

130 PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

- 150 LEGISLATIF MPR/ DPR/DPD
- 160 DPRD PROPINSI
- 170 DPRD KABUPATEN/ KOTA
- 180 HUKUM
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 200 POLITIK**
- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
- 280 PENGAWASAN PEMILU / PILKADA
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN/ TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 426 KEOLAHRAGAAN
- 427 KEPEMUDAAN
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 445 RSU, RSJ, RS KHUSUS
- 450 AGAMA
- 460 SOSIAL
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 475 TRANSMIGRASI
- 476 KELUARGA BERENCANA
- 480 MEDIA MASSA
- 500 PEREKONOMIAN**
- 518 KOPERASI
- 520 PERTANIAN
- 522 KEHUTANAN
- 523 PERIKANAN DAN KELAUTAN
- 524 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- 525 PERKEBUNAN
- 526 KETAHANAN PANGAN
- 527 PENYULUHAN
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 550 PERHUBUNGAN

554 POS  
555 TEKNOLOGI INFORMASI  
556 PARIWISATA DAN REKREASI  
557 METEOROLOGI  
560 TENAGA KERJA  
570 PENANAMAN MODAL  
580 PERBANKAN MONETER  
590 AGRARIA  
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN  
610 PENGAIRAN  
620 JALAN  
630 JEMBATAN  
640 BANGUNAN  
650 TATA RUANG KOTA  
660 TATA LINGKUNGAN  
670 KETENAGAAN  
680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM  
690 AIR MINUM  
**700 PENGAWASAN**  
710 BIDANG PEMERINTAHAN  
720 BIDANG POLITIK  
730 BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN  
740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
750 BIDANG PEREKONOMIAN  
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM  
770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK  
780 BIDANG KEPEGAWAIAN  
790 BIDANG KEUANGAN  
**800 KEPEGAWAIAN**  
810 PENGADAAN  
820 MUTASI  
830 KEDUDUKAN  
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI  
850 CUTI  
860 PENILAIAN  
870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN  
880 PEMBERHENTIAN  
890 PENDIDIKAN PEGAWAI  
**900 KEUANGAN**  
910 ANGGARAN  
920 AKUNTANSI  
930 PERBENDAHARAAN  
940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN  
950 PENGELOLAAN KAS DAERAH  
970 PENDAPATAN

## II. RINCIAN

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
001.4	Bandir / Umbul-umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan Secara Adat
002.5	Penghargaan Lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya/ Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun /HUT (Hari Jadi Provinsi/Kab/Kota)
004	Ucapan
004.1	Terimakasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat Lainnya
007	-
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
011	Gedung kantor, termasuk instalasi
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas
013	Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)
014	Rumah susun/ apartemen
015	Peminjaman sarana prasarana kantor (ruang, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)
016	Pengurusan kendaraan dinas
017	Keamanan/ Ketertiban kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera



019.2	Tata Tempat
019.21	Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
020	BARANG DAN JASA
021	Penawaran
021.1	Penawaran Barang
021.2	Penawaran Jasa
022	Barang
022.1	Barang bergerak
022.2	Barang tidak bergerak
023	Jasa
024	-
025	-
026	-
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang
027.1	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/anwijzing, negosiasi, evaluasi
027.2	SPK, Kontrak/Amandemen / Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerjaan (SPMK)
027.4	Serah terima pekerjaan
027.5	Pemeriksaan Pekerjaan
027.6	Perpanjangan waktu / force majore
027.7	Denda
027.8	Sanggahan
027.9	Pemeliharaan barang / jasa
028	Inventaris
028.1	Pendataan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
029	-
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-barang tidak bergerak (tanah,perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen/ bangunan bersejarah dll)
033	Tanaman
034	Alat-alat berat
035	Hewan
036	Barang persediaan dalam gudang
037	Alat pengangkut (darat, laut, udara)
038	Peralatan pabrik/laboratorium
039	Peralatan kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
040	PERPUSTAKAAN/ DOKUMEN/KEARSIPAN/ SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi/Layanan
041.31	Keanggotaan
041.32	Peminjaman dan pengembalian
041.4	Deposit

041.5	Pemeliharaan, Pelestarian/alih media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan buku, rak
041.7	Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan
041.8	Jenis-jenis perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
045.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan
045.41	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Kearsipan
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data elektronik
049	-
050	PERENCANAAN DAN EVALUASI meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja SKPD

050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
050.26	Jawaban Bupati atas pandangan Fraksi
050.27	Nota Keuangan
050.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan Berkala
051.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
051.3	LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis
052.11	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
052.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
052.13	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
052.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
053	-
054	-
055	-
056	-
057	-
058	-
059	-
060	-
061	Organisasi
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata Tertib Kantor, Jam Kerja, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel dinas dan stempel jabatan
065.3	Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah
065.4	Alamat-alamat kantor dan pejabat
065.5	Ketentuan pakaian dinas dan atribut
066	Tata Hubungan Kerja
067	Standart Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
069.1	Pengukuran /Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
069.2	Uraian Jabatan
070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
072	Pengembangan
072.1	Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster, Kab/Kota, Desa inovatif
072.4	Inkubator Teknologi dan Bisnis

072.5	Pameran produk inovasi /Ristek
072.6	BTC (Bisnis Teknologi Center)
072.7	Raptek (Penerapan Iptek)
072.8	HKI (fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian strategis/diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi/ sosialisasi hasil penelitian
074	Kerjasama Penelitian
075	Perekayasaan
076	Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
078	-
079	-
080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati/ Walikota
083	Komponen, Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi lainnya (diluar Kemendagri)
085	Internasional di Dalam Negeri
086	Internasional di Luar Negeri
087	-
088	-
089	-
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat eselon I)
094	Perjalanan PNS, termasuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100	PEMERINTAHAN
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	-
109	-
110	PEMERINTAH PUSAT
111	Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
111.1	Pertanggung Jawaban Presiden kepada MPR

111.2	Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshuffle
113.2	Penunjukan Menteri Ad Interm
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kemeterian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Departemen
118	Otonomi Desentralisasi
119	Kerjasama antar Kementerian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahkan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
120.2	-
121	Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
122	Wakil Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
123	Sekretaris Wilayah / Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan / Pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibukota Provinsi
125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
128	-
129	-
130	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Bupati/Walikota(LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koordinasi
130.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
130.12	Instansi vertikal
130.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar negeri (Sister City)
130.2	-
131	Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

132	Wakil Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb
133	Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Muspida
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Perubahan Batas Wilayah
135.4	Pemekaran wilayah
135.5	Permasalahan Batas wilayah
135.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten/ Kotamadya
135.7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Pembentukan Kecamatan
138.2	Pembentukan Kecamatan
138.3	Pemekaran Kecamatan
138.4	Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
138.5	Pemindahan Ibukota Kecamatan
139	-
140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141	Pamong Desa (meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima dan sebagainya )
141.1	Kepala Desa, Kelurahan meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima dan sebagainya
141.11	Biaya Pemilihan Kepala Desa
141.12	Lembaga Musyawarah Daerah, meliputi Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan dan kegiatan LMD
141.3	Perangkat Desa, Kelurahan
141.31	Sekretaris Desa, kelurahan meliputi Pencalonan, Penyeleksian, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara
141.32	Kepala Dusun, meliputi Pencalonan, Penyeleksian, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara
142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Keluarahan (APBDes/Kel)
142.1	Rutin (termasuk penghasilan pamong Desa)
142.2	Pembangunan
142.3	Anggaran Belanja Tambahan
142.4	Pendapatan Desa
142.41	Urusan Desa
142.42	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
142.43	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi
142.44	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota
142.45	Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan pada Desa
142.46	Penerimaan dari Pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa
142.47	Pendapatan asli Desa
142.48	Penerimaan lain-lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
142.49	Hasil dari gotong royong masyarakat
143	Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll
143.1	Tanah Hak Pakai Desa

143.11	Tanah Bengkok
143.12	Tanah Titisara
143.13	Tanah Penganggonan
143.14	Tanah Desa lainnya
143.2	Jalan Desa
143.3	Bangunan Desa
143.4	Kekayaan Desa
144	Lembaga-lembaga tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD dll
144.1	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
144.2	LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
145	Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
146	Kewilayahan
146.1	Pemekaran Desa/ Kelurahan
146.2	Pembentukan Desa/ Kelurahan
146.3	Perubahan batas wilayah/ perluasan Desa/ kewilayahan
146.4	Perubahan nama-nama Desa / Kelurahan
146.5	Permasalahan batas Desa
146.6	Penyatuan Desa/ Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa/ Kelurahan
147	Lembaga-lembaga tingkat Desa jangan diklasifikasikan disini Lihat 410 dengan rinciannya
148	Pembangunan Desa
148.1	Pembinaan Usaha gotong royong
148.11	Swadaya gotong royong
148.12	Lembaga Sosial Desa (LSD)
148.13	Latihan Kerja Masyarakat
148.14	Penyuluhan
148.15	Kelembagaan Desa
148.2	Perekonomian Desa
148.21	Produksi Desa
148.22	Keuangan Desa
148.23	Koperasi Desa
148.24	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
148.25	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
148.26	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
148.3	Prasarana Desa
148.31	Pembinaan
148.32	Bimbingan Teknis
148.33	Pemukiman kembali Penduduk
148.34	Masyarakat pra Desa
148.35	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
148.4	Pengembangan Desa
148.41	Tingkat perkembangan Desa
148.42	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
148.43	Tata Desa
148.44	Perlombaan Desa
148.5	Koordinasi
148.51	Sektor Khusus (K)
148.52	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
148.53	Tim Koordinasi Pusat
148.54	Kerjasama

149	RT - RW/ RK
150	LEGISLATIF MPR/ DPR/DPD
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian Antar Waktu
152	Keanggotaan DPR
152.1	Pencalonan
152.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
152.3	Pemberhentian
152.31	Recall
152.32	Meninggal
152.4	Pelanggaran
152.5	Pergantian Antar Waktu
153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
153.3	Pemberhentian
153.31	Recall
153.32	Meninggal
153.4	Pelanggaran
153.5	Pergantian Antar Waktu
154	Persidangan
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan/ Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja/ Study Banding/ Konsultasi
160	DPRD PROPINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan lain (Pansus)
162	Persidangan



162.1	Rapat-rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
162.16	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertib
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan/ Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja/ Study Banding/ Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPR Propinsi
166	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN/ KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
171.3	Pelanggaran
171.4	Pemberhentian Antar Waktu
171.41	Meninggal Dunia
171.42	Mengundurkan Diri
171.43	Diberhentikan
171.5	Alat Kelengkapan Dewan
171.51	Pimpinan
171.52	Badan Musyawarah
171.53	Komisi
171.54	Badan Legislasi Daerah
171.55	Badan Anggaran
171.56	Badan Kehormatan
171.57	Alat Kelengkapan lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-rapat
172.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.12	Rapat Pimpinan DPRD
172.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.16	Rapat Fraksi
172.2	Fraksi

172.3	Tata Tertib
172.4	Kode Etik
172.5	Reses
172.6	Peninjauan/ Kunjungan Lapangan
172.7	Kunjungan Kerja/ Study Banding/ Konsultasi
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPR Kabupaten
176	-
177	-
178	-
179	-
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang Undang Dasar
180.13	Undang Undang
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres / Perpres / Inpres
180.16	Kepmen / Permen / Inmen
180.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub / Pergub / Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten / kota meliputi Perda, KepBup/ Perbup / Inbup
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang / Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183112	Pengadilan Tinggi
183113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183123	Mahkamah Agama Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183132	Mahkamah Militer Tinggi

183133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verzet
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan Hukum
183.41	Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
183.42	Kajian Hukum / Peraturan Perundang-undangan
183.43	Dokumentasi dan Informasi Hukum
183.5	Bantuan Hukum, Meliputi LBH
183.51	Lembaga Bantuan Hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Pasport
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas Batas / Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi narapidana
186.2	Pembinaan narapidana
186.3	Pembebasan narapidana
186.4	Tahanan titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntut Umum
187.2	Penuntut Khusus
188	Hukum Adat
189	-
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	-
198	-
199	-
200	POLITIK
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri

201.1	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa
201.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya
201.4	Keadaan Politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan)
201.6	Orde Baru
201.7	Orde Reformasi
202	-
203	-
204	-
205	-
206	-
207	-
208	-
209	-
210	KEPARTAIAN
211	Partai Politik
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas/ Musda PARPOL
211.5	Struktur / Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
212	Partai / Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan Pembubaran Partai / Organisasi Terlarang
212.2	Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai Organisasi Terlarang
212.3	Ijin Meninggalkan Tempat atau Domisili bagi Anggota Partai / Organisasi Terlarang
212.4	Daftar Berkala Mengenai Keadaan Organisasi / Anggota Partai / Organisasi Terlarang
212.5	Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai / Organisasi Terlarang
213	-
214	Partai Peserta Pemilu
214.1	Partai NasDem
214.2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
214.3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
214.4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
214.5	Partai Golongan Karya (GolKar)
214.6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
214.7	Partai Demokrat
214.8	Partai Amanat Nasional (PAN)
214.9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
214.10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
214.11	Partai Damai Aceh (PDA)
214.12	Partai Nasional Aceh (PNA)
214.13	Partai Aceh (PA)
214.14	Partai Bulan Bintang (PBB)
214.15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
215	-
216	-

217	-
218	-
219	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Pembentukan Organisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
221.3	Program Kerja Organisasi
221.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
222	Pembinaan Organisasi
222.1	Kegiatan Organisasi dan pelaporannya
222.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
223	-
223	-
224	-
225	-
226	-
227	-
228	-
229	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Pembentukan Organisasi
231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
231.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
231.3	Program Kerja Organisasi
231.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
232	Pembinaan Organisasi
232.1	Kegiatan Organisasi dan pelaporannya
232.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
239	-
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Pembentukan Organisasi
242.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
242.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
242.3	Program Kerja Organisasi
242.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
242	Pembinaan Organisasi
242.1	Kegiatan Organisasi dan pelaporannya
242.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
243	-
244	-
245	-
246	-
247	-
248	-
249	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	Pembentukan Organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
251.3	Program Kerja Organisasi

251.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
252	Pembinaan Organisasi
252.1	Kegiatan Organisasi dan pelaporannya
252.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Pembentukan Organisasi
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
261.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
261.3	Program Kerja Organisasi
261.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
262	Pembinaan Organisasi
262.1	Kegiatan Organisasi dan pelaporannya
262.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
263	-
264	-
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-
270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
271	Pencalonan
271.1	Pemilihan Presiden
271.2	Pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Prov., DPRD Kab./Kota )
271.3	Pemilihan Gubernur
271.4	Pemilihan Bupati/ Walikota
272	Nomor Urut/ Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
274.1	KPU Pusat
274.2	KPU Provinsi
274.3	KPU Kabupaten
274.4	PPK / Panitia Pemilihan Kecamatan
274.5	PPS / Panitia Pemilihan Suara
275	Pemilih/ Daftar Pemilih
275.1	Pemutakhiran Data
275.2	Bahan DPS (Terkait DP4 /Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu, dari Kependudukan)
275.3	DPS (Daftar Pemilih Sementara)
275.4	DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)
275.5	DPT (Daftar Pemilih Tetap)
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
276.5	Logistik
277	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif

278.2	Penetapan Pemenang Pilkada
279	KPU / KPUD
280	PENGAWASAN PEMILU / PILKADA
281	Pemantauan
282	Pelanggaran
283	Sengketa
284	Bawaslu
285	Panwaslu Provinsi
286	Panwaslu Kabupaten
287	Panwaslu Kecamatan
288	PPL (Petugas Pengawas Lapangan)
289	-
290	DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
291	-
292	-
293	-
294	-
295	-
296	-
297	-
298	-
299	-
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan
300.2	Pembinaan dan Pengaturan mengenai Larangan
300.3	Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan / Ancaman Keamanan / Ketertiban Umum
300.4	Program Kerja serta Tata Cara Penanggulangan Keamanan
300.5	Laporan dari Instansi yang Berwenang
300.6	Laporan adanya kejadian teroris
300.7	Pengamanan Sidang (Tamu Negara)
300.8	Pengawalan Pejabat
301	Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakan Pelaksanaan Perda
304	Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
308	-
309	-
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
317	-

318	-
319	-
320	KEMILITERAN/ TNI
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekayaan ABRI Pejabat Sipil dari ABRI klasifikasikan Dwifungsi ABRI
325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat
326	-
327	-
328	-
329	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
332	Hura-hura / Demonstrasi
333	Senjata Api / Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat Kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan atau Larangan
339	-
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
340.11	Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Hansip
340.12	Pengerahan dan Pengendalian Hansip
340.13	Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
340.14	Pembinaan Anggota Hansip / Linmas
340.15	Penghargaan Anggota Hansip
340.16	Hansip / Linmas Lanjut Usia
340.17	Data Matrik Hansip dan Menwa
340.18	Pendidikan / Latihan Hansip dan Menwa
340.19	Latihan Ketrampilan PAM Swakarsa
340.2	Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh Masyarakat
340.21	Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh
340.22	Pemberian Tali Asih bagi Anggota
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Linmas
341.2	Pendidikan / Latihan Linmas
341.3	Pelatihan PAM Swakarsa
341.4	Pendidikan / latihan MENWA
342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi Anggota Linmas
343.1	Pemberian Tali Asih bagi Anggota Linmas
343.2	Bantuan Modal Usaha bagi Anggota Linmas
343.3	Santunan uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan Anggota Linmas
344	-
345	-
346	-



347	-
348	-
349	-
350	KEJAHATAN
351	Makar / Pemberontakan / terorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan, Pencurian / Perampasan
354	Subversi / Penyelundupan / Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
355.1	Uang
355.2	Ijazah
355.3	Kejahatan Pemalsuan lainnya
356	Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
358.1	Kenakalan Remaja/Pelajar, Razia, Penyuluhan
358.2	Perselingkuhan
359	Kejahatan lainnya (Traficking, Hipnotis, dll)
360	BENCANA
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Berapi / Gempa / Tsunami
362	Banjir / Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
369	-
370	KECELAKAAN
371	Latihan SAR
372	Latihan Ketrampilan Penyelamatan di Air dan Menyelam
373	Pelatihan Managemen bagi Pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan Kemampuan Pusdalop bagi Aparat PBP
376	Latihan Ketrampilan Pemadam Kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/ penyelidikan Kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan Teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS ( Pusat Pengendalian Operasi )

386	Kunjungan Lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi Pemerintah Pusat
392	Instansi Pemerintah di Daerah
393	Lembaga Internasional
394	Lembaga non pemerintah nasional
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
401.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
401.2	Anak Asuh
402	Orang Tua Asuh
403	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
404	-
405	-
406	-
407	-
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong
411.1	Swadaya Gotong Royong
411.11	Penataan Gotong Royong
411.12	Gotong Royong Dinamis
411.13	Gotong Royong Statis
411.14	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.21	Pembinaan
411.22	Klasifikasi
411.23	Proyek
411.24	Musyawarah
411.3	Latihan Kerja Masyarakat
411.31	Kader Masyarakat
411.32	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.33	Pusat Latihan
411.34	Kursus-kursus
411.35	Kurikulum/ Syllabus
411.36	Ketrampilan
411.37	Pramuka
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.41	Program
411.42	Pembinaan Organisasi
411.43	Kegiatan
411.5	Penyuluhan
411.51	Publikasi
411.52	Peragaan

411.53	Sosio Drama
411.54	Siaran Pedesaan
411.55	Penyuluhan Lapangan
411.6	Kelembagaan Desa
411.61	Kelompok Tani
411.62	Rukun Tani
411.63	Subak
411.64	Dharma Tirta
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Desa
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan/ Simulasi
412.25	Perkreditan Desa
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Usaha Unit Desa (KUD)
412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
412.41	Jumlah Desa yang diberi bantuan
412.42	Pengarahan
412.43	Pusat
412.44	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.51	Pusat
412.52	Daerah
412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
412.61	Bantuan Langsung
412.62	Bantuan Keserasian
412.63	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Sarana dan Prasarana Desa
413.1	Prasarana Desa
413.11	Pembinaan
413.12	Bimbingan Teknis
413.2	Pemukiman Kembali Penduduk
413.21	Lokasi
413.22	Diskusi
413.23	Pelaksanaan
413.3	Masyarakat Pradesa
423.31	Pembinaan
413.32	Penyuluhan
413.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
413.41	Rumah Sakit
413.42	Proyek Perintis Pelaksanaan
413.43	Pengembangan

413.44	Perbaikan Kampung
413.5	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.12	Jumlah Desa
414.13	Pemekaran Desa
414.14	Pembentukan Desa Baru
414.15	Evaluasi
414.16	Bagian
414.2	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
414.21	Penyuluhan Program/ Fasilitas Program
414.22	Lokasi UDKP
414.23	Pelaksanaan
414.24	Bimbingan/ Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.3	Tata Desa/ Profil Desa dan Kelurahan
414.31	Inventarisasi
414.32	Penyuluhan Pola Tata Desa
414.33	Pemetaan
414.34	Pedoman Pelaksanaan
414.35	Evaluasi
414.4	Perlombaan Desa
414.41	Pedoman
414.42	Penilaian
414.43	Kejuaraan
414.44	Piagam
415	Koordinasi
415.1	Sektor khusus (K)
415.2	Rapat Koordinasi Horisontal
415.3	Tim Koordinasi Pusat (TKP)
415.4	Kerjasama
415.41	Luar Negeri
415.42	Perguruan Tinggi
415.43	Kementerian / Lembaga Pemerintah
415.44	Lembaga Lainnya
416	Bantuan Langsung ke Masyarakat (Bantuan Langsung Tunai/BLT, Beras Miskin dll)
417	Jaminan Kesehatan Masyarakat (perawatan, persalinan, pengobatan dll)
418	Jaminan Pendidikan
419	-
420	PENDIDIKAN
420.1	Kebijakan dan program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalis dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan, (PKBM dll)
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Pra Sekolah (PAUD, Plygroup/ TK)
421.11	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) / Play Group
421.12	TK (Taman Kanak-kanak)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi

421.6	Kegiatan Sekolah Dies Natalies, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar diantaranya Reuni, Darmawisata, widyawisata, Lomba-lomba : LKS. Olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains) Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar)
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian Pendaftaran, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah diantaranya SPP, SPI
422.5	Bea siswa dan penghargaan siswa berprestasi
422.6	Ijazah, sertifikat
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata), Magang/Praktek/PKL (Praktek Kerja Lapangan)
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah, Jurnal
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar Guru, Dosen, Dekan, Rektor, Guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi
424.1	Pertukaran Guru/dosen ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan sekolah
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
426	Keolahragaan
426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.11	Olahraga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
426.12	Olahraga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
426.13	Olahraga rekreasi / massal (senam, sepeda santai, olah raga tradisional)
426.14	Iptek dan Industri Olahraga
426.15	Sarana Prasarana keolahragaan
426.151	Peralatan Olahraga
426.152	Perlengkapan Olahraga
426.153	Gedung Olahraga
426.154	Stadion
426.155	Lapangan
426.156	Kolam Renang
426.2	Kemitraan Olahraga

426.3	Pesta Olahraga
426.31	PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni)
426.32	PORKAB (Pekan Olahraga Kabupaten)
426.33	POR Prov. ( Pekan Olahraga Provinsi)
426.34	PON (Pekan Olahraga Nasional)
426.35	POP (Pekan Olahraga Pelajar) Nasional/Provinsi / Kabupaten
426.4	Hobby
427	Kepemudaan
427.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
427.3	Sarana Prasarana kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
427.4	Kemitraan pemuda
427.5	Karang Taruna
428	Kepramukaan/Kepanduaan
429	Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Luar Negeri
430	KEBUDAYAAN
430.1	Kebijakan dan program Pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis)
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
431.23	Lembaga Adat
431.24	Kegiatan Adat/Tradisi
432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk Pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
436	Penghayat Kepercayaan
437	Festival, Pentas Seni
438	Cagar Budaya
438.1	Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara dll)
438.2	Tempat Pemerintahan ( istana, kerajaan dll)
438.3	Makam (Tokoh Agama, Tokoh Pemerintahan dll)
439	-
440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan program Pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
441.6	Perawatan

441.7	Kesehatan masyarakat meliputi : Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM), pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
441.92	JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah)
441.93	JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)
441.94	BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
441.95	Jaminan Lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan Obat
442.3	Penyimpanan Obat
442.4	Distribusi Obat
442.5	Pengawasan Obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan Obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	TBC (Tuberculosis)
443.25	Kholera
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang
443.31	Malaria
443.32	Dengue Haemorrhagie Fever (Demam berdarah, DHF)
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptospirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit Lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular sumber Binatang (P2B)
443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Militus (DM)
443.46	Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Serviks
443.47	Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Mammae
443.48	Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Hepar
443.49	Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. Paru, dan Penyakit Lainnya
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida

443.54	Pencemaran Udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene Sanitasi
443.61	Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan, Minuman (TPPMM), Jasa Boga
443.62	Sarana Air Minum
443.63	Pestisida, Insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443.67	Higiene Sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene Sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene Sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian Khusus
443.71	Dekopensatiokordosis (serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443.74	PPOM (Penyakit Paru Obstruktif Menahun)
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk
444.3	Keracunan Makanan
444.4	Menu Makanan Rakyat
444.5	Gondok Endemik (GAKI)
445	RSU, RSJ, RS Khusus
445.1	Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD (Instalasi Gawat Darurat)
445.14	IBS (Irritable Bowel Syndrome)
445.15	ICU (Intensive Care Unit)
445.16	MCU (Medhical Chek Up)
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Darah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD/Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO (International Organization for Standardization)



445.63	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi Layanan Kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
446.5	Pendidikan dibidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi Alat Kesehatan
447.2	Penyimpanan Alat Kesehatan
447.3	Distribusi Alat Kesehatan
447.4	Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Alternatif/Tradisional
448.1	Pijat
448.2	Tusuk Jarum / Akupuntur
448.3	Jamu Tradisional/ Herbal
448.4	Dukun
448.5	Bekam
449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
449.1	Puskesmas dan Puskesmas Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.41	Posyandu Ibu Hamil dan Balita
449.42	Posyandu Lansia
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
450	AGAMA
450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
450.2	Bantuan di bidang keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Mushola, Surau)
451.3	Tokoh agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah, MTs. MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/Marasah Diniyah, Pondok

	Pesantren dll)
451.45	Sarana Pendidikan meliputi, buku, alat peraga pendidikan, gedung sekolah dll)
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ, Istigosah dll)
451.48	Organisasi / Lembaga Keagamaan
451.5	Harta Agama Wakaf, Baitulmal dsb
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi Keagamaan bukan Politik, (Majelis Ulama, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'I, Kyai, Ustdaz dll)
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, (Pendeta Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Katholik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pastur
453.4	Mazhab Agama Katholik
453.5	Organisasi Agama Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadat Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadat Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadat Klenteng, dll
456.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
456.4	Mazhab
456.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
457	-
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penderita Cacat
461.1	Cacat Ganda
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan / Orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis

462.3	Tuna Susila
462.4	Anak Nakal
462.5	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Kesejahteraan Anak
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak Asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu Teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan Meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan jandanya
464.2	Perintis kemerdekaan Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, Tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll
466	Sumbangan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.11	Jaminan Sosial
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dsb
466.3	Panti Asuhan
466.4	Panti Wredha
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat Suku Terasing meliputi : Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Operasi Busana Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dsb
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata Penduduk / Data Pribadi
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan Penduduk WNI
471.22	Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara

471.24	Daerah terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.32	Orang asing tinggal sementara
471.33	Orang asing tinggal tetap
471.34	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.41	Akibat bencana alam
471.42	Akibat kerusuhan sosial
471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.44	Pendaftaran Penduduk Rentan
472	Pencatatan Sipil
472.1	Kelahiran, Kematian dan Advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi
472.2	Perkawinan, Perceraian dan advokasi
472.21	Perkawinan agama Islam
472.22	Perkawinan agama non Islam
472.23	Perceraian agama Islam
472.24	Perceraian agama non Islam
472.25	Advokasi
472.3	Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan Anak
472.32	Pengakuan Anak
472.33	Pengesahan Anak
472.34	Perubahan Akta
472.35	Pembatalan Akta
472.36	Advokasi
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.41	Akibat Perkawinan
472.42	Akibat Kelahiran
472.43	Non Perkawinan / Non Kelahiran
472.44	Naturalisasi
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan
473.1	Teknologi informasi
473.2	Pengolahan data Kependudukan
473.21	Pendaftaran Penduduk
473.22	Kejadian vital penduduk
473.23	Penduduk non Registrasi
473.3	Pelayanan Informasi kependudukan
474	Perkembangan Penduduk
474.1	Pengarahannya kuantitas penduduk
474.11	Struktur Jumlah
474.12	Komposisi
474.13	Fertilitas
474.14	Kesehatan reproduksi
474.15	Morbiditas Penduduk

474.16	Mortalitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas penduduk
474.21	Anak dan remaja
474.22	Penduduk Usia produktif
474.23	Penduduk lanjut usia
474.24	Gender
474.3	Penataan persebaran penduduk
474.31	Migrasi antar wilayah
474.32	Urbanisasi
474.4	Perlindungan dan pemberdayaan penduduk
474.5	Pengembangan wawasan kependudukan
475	TRANSMIGRASI
475.1	Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi
475.11	Informasi Potensi Peluang Bekerja dan Berusaha di Daerah Transmigrasi
475.12	Perbandingan Potensi Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
475.13	Pemasyarakatan / Sosialisasi Transmigrasi
475.14	Peran Serta Lembaga dan Instansi terkait serta Media Massa dalam Penyampaian Informasi Transmigrasi
475.15	Publikasi Transmigrasi melalui Pameran dan Kesenian
475.16	Bimbingan dan Penyuluhan Transmigrasi bagi Masyarakat Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
475.17	Kerjasama di Bidang Transmigrasi
475.18	Kepulangan Transmigran karena Daerah terjadi Konflik
475.2	Permukiman Transmigrasi
475.21	Penggunaan Tanah Permukiman Transmigrasi
475.22	Pengembangan, Struktur Wilayah dan Analisis Data Wilayah Transmigrasi
475.23	Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan, Study Kelayakan dan Dampak Lingkungan Transmigrasi
475.24	Teknis Ruang Satuan Pemukiman dan Lokasi / Peta Informasi Permukiman
475.25	Standarisasi dan Spesifikasi Teknis Rumah Transmigran Fasilitas Umum / Sosial dan Jaringan Transportasi
475.26	Tanah Permukiman, Pengadaan Areal Tanah dan Pembebasannya, Identifikasi, Pengukuran dan Pembuatan Batas Areal Tanah
475.27	Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Permukiman Transmigrasi
475.28	Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi
475.281	Rancangan dan Kemanfaatan Areal Tanah
475.282	Rancangan Kapling TSM
475.283	Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha
475.284	Penyelesaian Kekurangan Lahan Usaha kepada Transmigran dan Sengketa Tanah
475.285	Inventarisasi Penataan Kembali dan Penggunaan Areal Tanah
475.286	Pengukuran Batas Unit Pemukiman
475.287	Penyelesaian Perubahan Areal dan Urusan Perijinan pemanfaatan areal tanah
575.29	Sarana Pemukiman Transmigrasi
475.291	Pembinaan, Pengendalian, Penyiapan Bangunan Rumah Transmigrasi, Jamban Keluarga dan Fasilitas Umum
475.292	Pembinaan dan Pengendalian Penyiapan Sarana Air Bersih
475.293	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Sumber Energi
475.294	Pembinaan dan Pengendalian Peningkatan Sarana
475.295	Pembinaan, Pengendalian dan Teknis Peningkatan Potensi Lahan dan Lingkungan

475.3	Pengarahannya, Pemindahan dan Penempatan
475.31	Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengerahan dan Penempatan
475.32	Teknis Penyuluhan dan Motivasi dalam Pengerahan dan Penempatan
475.33	Pengerahan
475.331	Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
475.332	Berkas Persyaratan dan Adminitrasi Calon Transmigran
475.333	Transmigran yang Dinyatakan Lulus Penyaringan
475.34	Pemberangkatan Transmigran
475.341	Pengangkutan Transmigran melalui Laut, Darat dan Udara
475.342	Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Pemberangkatan
475.343	Pelaksanaan Pengurusan Pemberangkatan
475.344	Pengawasan Perjalanan Transmigran
475.345	Pengaturan Rute Pemberangkatan
475.346	Alokasi Penempatan dan Surat Perintah Pemberangkatan
475.35	Penempatan Transmigran
475.351	Kesiapan Lokasi dan Daya Tampung
475.352	Pendataan Transmigran Di lokasi yang masih Dibina
474.353	Data Transmigran yang Meninggalkan Lokasi Di setiap UPT
474.354	Pemantauan Penempatan Transmigrasi Pengganti
475.4	Penampungan Transmigrasi (Transito), dan Pelatihan Transmigrasi
475.41	Pelatihan Transmigran
475.411	Program Pengajaran dan Metode Pelatihan
475.412	Penyusunan Silabus dan Modul Pelatihan
475.413	Penyusunan Calon Peserta / Pelatih
475.42	Penampungan Transmigran di Transito
475.421	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.422	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.423	Pelayanan perbekalan/ peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigran
475.51	Identifikasi dan penjajagan pembinaan
475.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
475.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.513	Identifikasi, analisis data dan pedoman pelaksanaan rencana Teknis pembinaan tahap pembinaan
475.52	Pembinaan pendidikan
475521	Penyediaan/ penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.54	Pembinaan kesehatan
475541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB
475542	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475543	Pendistribusian bantuan pangan
475.55	Pembinaan rokhani
475551	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475552	Bimbingan adaptasi masyarakat
475553	Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial
475.56	Pelayanan pos di daerah transmigrasi
475.57	Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
475.58	Penilaian transmigran teladan
475.59	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha

476	Keluarga Berencana
476.1	Alat kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3	Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
476.4	Pos KB Desa
476.5	Akseptor KB
477	-
488	-
479	-
480	MEDIA MASSA
480.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa
481	Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481.1	Surat kabar
481.2	Majalah
481.3	Buletin
481.4	Jurnal
481.5	Press release, klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51	Perindustrian perdagangan termasuk 9 harga bahan baku pokok
481.52	Perekonomian dan perbankan
481.53	Bidang lainnya
481.6	Layanan informasi/ Leaflet
481.7	Masukan analisis Gubernur
481.8	Masukan analisis Bupati/Walikota
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok pemantau isi siaran
482.6	Pengkajian isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Periklanan
483.1	Ketentuan Pemasangan reklame
483.2	Pameran
484	Kewartawanan / Jurnalistik
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus kewartawanan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan jurnalistik khusus wartawan
484.7	Temu Pers / Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Kunjungan Wartawan Asing
485	Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian Informatian Center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training berita Jurnalistik

486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
486.6	Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
486.7	Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Demak
487	Hubungan antar lembaga
487.1	Non Pemerintah
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar Negeri
487.31	Promosi Luar Negeri
487.32	Kunjungan Wartawan Asing
488	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi
489	Sistem naskah sosialisasi kegiatan Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati/ Walikota)
489.1	Himpunan naskah sambutan, himpunan paparan, himpunan keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan himpunan Dialog Interaktif
489.2	Dialog interaktif
489.3	Rubrik
489.4	Materi/ pointerSambutan, paparan, naskah Keynote Speaker, Rubrik dan dialog Interaktif
489.5	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan
490	-
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-
497	-
498	-
499	-
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan stabilisasi
501	Pengadaan pangan
502	Pengadaan sandang
503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuatu bidang Klasifikasi pada masalahnya.
504	-
505	-
506	-
507	-
508	-
509	-
510	PERDAGANGAN
510.1	Promosi Perdagangan
510.11	Pekan raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran



510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran sembako
510.22	Pemasaran hasil industri
510.23	Penentuan harga pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan pelaporan
510.4	Perizinan (HO/Hinder Ordonantie/Izin Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
510.42	Perpanjangan
510.43	Izin prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	Tera
510.61	Tera Ulang Ukuran
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anak timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian/ kontrak
510.73	Serah terima
510.8	Perizinan/ rekomendasi tanda pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart tingkat tiga
510.92	Standart kerja satuan ukuran
510.93	Ukuran metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium metrologi
510.933	Tanki ukur mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter
510.936	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok, tambahan kode wilayah beras garam, minyak goreng, minyak tanah, sabun dan sebagainya.
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor hasil industri
512.2	Izin ekspor

512.3	Pengembangan pasar luar negeri
512.4	Managemen perdagangan internasional
512.5	Ekspor hasil industri
512.51	Kebijakan
512.52	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan ekspor barang
512.7	Pengawasan mutu barang
512.8	Eksportir terdaftar
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Izin impor
513.11	Pemberian izin
513.12	Pengendalian izin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Managemen Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan import
513.41	Pembinaan import
513.42	Pengendalian import
513.43	Pemantauan Import
513.5	Faktor-faktor pendukung
513.6	Pengawasan mutu barang import
513.7	Penyaluran kegiatan import
513.71	Bahan konsumsi
513.72	Bahan baku
513.73	Bahan penolong
513.8	Evaluasi dan pelaporan kegiatan import
514	Perdagangan antar pulau
514.1	Kerjasama bahan baku
514.2	Industri pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar negeri
515.1	Pengembangan potensi luar negeri
515.11	Promosi dan Informasi
515.12	Pameran
515.13	Kerjasama
516	Pergudangan Termasuk tanki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti kemas
516.2	Tanki penyimpanan
517	Aneka Usaha Perdagangan
518	Koperasi
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi pertanian dan perkebunan
518.111	Koperasi pertanian tanaman pangan
518.112	Koperasi perkebunan
518.12	Koperasi non pertanian
518.121	Koperasi perikanan
518.122	Koperasi peternakan
518.13	Permodalan koperasi
518.131	Pemupukan koperasi
518.132	Pemanfaatan modal
518.133	Perbankan dan asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi

518.135	Kredit Progran Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan jasa koperasi
518.141	Distribusi dan bahan pokok
518.142	Distribusi aneka bahan
518.143	Distribusi kerjasama niaga
518.144	Jasa angkutan
518.145	Jasa perumahan
518.146	Aneka jasa
518.15	Koperasi kelistrikan, industri dan telekomunikasi
518.151	Koperasi kelistrikan
518.152	Koperasi industri
518.153	Koperasi telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Perangkaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Perselisihan/ Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD )
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.234	Klasifikasi KUD Mandiri
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242	Adminitrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/ Manager Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	TKST (Tenaga Kerja Sukarela Terdidik)
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda kepada Koperasi/ KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi KUD
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntan

518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.312	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Kredit Usaha
518.321	Kredit Usaha Kecil
518.322	Kredit Usaha Menengah
518.33	Pengawasan Usaha
518.331	Pengawasan Usaha Mikro
518.332	Pengawasan Usaha Kecil
518.332	Pengawasan Usaha Menengah
519	-
520	PERTANIAN
521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/ Inmas termasuk kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultural (Sayuran, buah-buahan, tanaman Hias)
521.24	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi traktor dan sebagainya
521.33	Pembenihan dan Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama dan Penyakit tanaman pangan
521.411	Penyakit Tanaman Pangan
521.412	Hama Tanaman Pangan
521.42	Pemberantas
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendalian Hayati
521.43	Tanah Pertanian Pangan
521.431	Persawahan
521.432	Perladangan
521.433	Kebun
521.5	Pengusaha, petani
521.6	Lahan kritis/ KTA (Konservasi Tanah dan Air)
521.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian

521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
522	Kehutanan
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA (Pemeliharaan Permudaan Alam)
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendataan / Inventarisasi Areal Hutan
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Pengukur dan Pemetaan
522.231	Pengukuran
522.232	Perpetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH (Hak Pengusahaan Hutan)
522.311	Areal HPH
522.312	SK HPH
522.313	Kerjasama
522.314	Pembatalan/ penolakan
522.32	Modal dan peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusaha Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.333	Rencana Karya Lima Tahun RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Produksi non Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri kayu HPH
522.362	Industri kayu non HPH

522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI (Hutan Tanaman Industri) Pertukangan
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran hasil Hutan
522.45	Angkutan Hasil Hutan / SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.47	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
522.5	Perlindungan Hasil Hutan dan Pelestarian Alam
522.51	Konservasi Jenis
522.511	Satwa yang dilindungi
522.512	Satwa yang tidak dilindungi
522.513	Lembaga konservasi satwa
522.514	Lembaga konservasi tumbuhan
522.52	Kawasan konservasi
522.521	Cagar alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman Hutan Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL, UPL di dalam kawasan hutan
522.532	Amdal UKL, UPL di luar kawasan hutan
522.54	Bina cinta alam
522.541	Kelompok pecinta alam
522.542	Kader konservasi sumber daya alam
522.543	Penyuluh konservasi sumber daya alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan)
522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan

522.556	Sengketa Hutan
522.557	Hama dan Penyakit
522.558	Pestisida dan pupuk Tanaman Hutan
522.559	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.61	Pembenihan
522.611	Tegakan Benih
522.612	Pengadaan Benih
522.613	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.614	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengadaan dan Pengedar Bibit Bersertifikat
522.617	Pengadaan dan Pengedar bibit tidak bersertifikat
522.62	Tanaman Reboisasi
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi Lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi tanah dan air
522.625	Pengendalian Perladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	Perhutanan Sosial
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
522.633	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi
522.71	Hutan Produksi terbatas
522.72	Hutan Produksi yang dapat dikonservasi
522.8	Kawasan Lindung
523	PERIKANAN DAN KELAUTAN
523.1	Rencana , Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan budidaya : CBIB, CBIC
522.23	Sertifikasi Kesehatan Ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pelatihan Nelayan
523.32	Pembinaan Wanita Nelayan
523.33	Fasilitas Perizinan Pembudidayaan Ikan (SIUP, SIPI, SKP dll)
523.34	Pembenihan
523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
523.41	Eksport Hasil Perikanan
523.42	Import Hasil Perikanan
523.43	Pemasaran dalam negeri
523.44	Pengusaha perikanan
523.5	Sarana Perikanan
523.51	Pelabuhan Perikanan pantai
523.52	TPI / PPI (Tempat Penjualan Ikan / Pusat Penjualan Ikan)
523.53	Kesyahbandaran

523.54	Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb
523.6	Pengendalian Hama dan Penyakit
523.61	Penyakit Ikan
523.62	Hama Ikan
523.63	Obat-obat termasuk sertifikasinya
523.7	Konservasi dan Suaka Laut
523.71	Transplantasi Bibit Karang
523.72	Terumbu karang
523.73	Mangrove
523.74	Garam
523.75	Harta Karun didalam laut
523.76	Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir
523.8	Pengusaha, Nelayan
523.81	Kapal/ Motor boat
523.82	Jaring
523.83	Cold Storage
523.84	Tempat Es
524	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
524.1	Produksi
524.11	Perbibitan
524.12	Penyebaran dan pengembangan peternakan
524.13	Budidaya
524.2	Usaha Peternakan
524.21	Pelayanan usaha
524.22	Pengolahan hasil dan Pemasaran
524.23	Pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan
524.24	Promosi Produksi Peternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Pengamatan dan penyidikan Penyakit Hewan
524.32	Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
524.33	Obat-obat termasuk sertifikasinya
524.34	Pelayanan kesehatan hewan
524.4	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
524.41	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
524.42	Hygiene dan Sanitasi
524.43	Produk Hewani
524.5	Laboratorium Kesehatan Hewan
524.51	Pengujian Mutu asal hewan
524.52	Pengujian mutu produk bahan asal hewan
524.53	Standarisasi Bibit Ternak
524.6	Inseminasi buatan
524.61	Produksi Distribusi dan Pemasaran
524.62	Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
524.63	Kawasan Peternakan
524.64	Penyebaran ternak
524.7	Pembibitan dan Budidaya Ternak
524.71	Ternak non Ruminansia
524.72	Ternak Ruminansia
524.8	Organisasi Peternakan
524.81	Asosiasi Peternakan
524.82	Kelompok Tani Ternak
525	PERKEBUNAN



525.1	Program dan Pelaporan
523.11	Pelaporan dan Evaluasi Perkebunan
523.12	Monitoring
523.13	Statistik Perkebunan
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	Teh
525.23	Tembakau
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/ Kopra/ Kelapa sawit
525.27	Kopi
525.28	Kakao
525.28	Jenis tanaman yang lain
525.3	Usaha perkebunan
525.31	Pembibitan
525.32	Kelompok Tani
525.33	Kemitraan
525.34	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan
525.4	Perlindungan tanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	Pupuk
525.5	Alat dan mesin perkebunan
525.51	Power Sprayer
525.52	Hand Sprayer
525.53	Polibag
525.54	Alat Laboratorium Perkebunan
525.55	Reagen
525.56	Sarana / Alat Produksi Perkebunan
525.6	Pengolahan lahan
525.61	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.71	Penyuluhan
525.72	Sosialisasi
525.73	Informasi
526	Ketahanan Pangan
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.31	Mutu Hasil
526.32	Pengelolaan Hasil pangan
526.33	Pemasaran Hasil
526.34	Kemitraan
526.4	Distribusi pangan
526.41	Sistem dan Pola Distribusi
526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan keanekaragaman pangan

526.51	Rawan pangan, keamanan dan mutu pangan
526. 52	Pola konsumsi pangan masyarakat
526.53	Sistem informasi pangan
527	Penyuluhan
527.1	Sumber Daya Manusia
527.11	Penyuluh
527.11	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.11	Stake Holder
527.2	Kelembagaan
527.21	Struktural
527.21	Non Struktural
527.21	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.21	Lembaga Profesi
527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
527.31	Program Metode
527.31	Promosi / Pameran / Kampanye
527.31	Penghargaan / Lomba
527.31	Materi
528	-
529	-
530	PERINDUSTRIAN
530.1	Undang-undang gangguan
531	Industri logam
532	Industri Mesin/ Elektronik
533	Industri Kimia/ Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri makanan/ minuman
536	Aneka Industri/ Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah
540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	Minyak bumi/ Bensin
541.1	Pengusahaan
541.11	Eksplorasi
541.12	Kontrak Kerja
541.13	Pengelolaan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
542.1	Energi Alternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	Energi Baru Terbarukan
542.15	Perizinan
542.16	Rekomendasi

542.17	Pembinaan dan Pengawasan
542.2	Konservasi Energi
542.3	Pemetaan Energi
542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, Mineral dan Batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP Bantuan
543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perizinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP Operasi Produksi
543.33	IUP Operasi Produksi Khusus
543.34	Izin Usaha Jasa Pertambangan
543.35	Pencabutan Izin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.52	Penerbitan Kegiatan Pertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.61	Reklamasi
543.62	Penutupan
544	Air Tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	Imbuhan CAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi
545.3	Vulkanologi
545.31	Pengawasan Vulkanologi
545.32	Panas Bumi
545.4	Hidrogeologi
545.5	Gerakan Tanah (Longsor, Amblesan)
545.6	Pengawasan, Pengendalian
546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan Energi
549	-

550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan timbang/ Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan, Rambu-Rambu
551.32	Lalu Lintas
551.33	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana/ Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan, Rambu-Rambu
551.42	Lalu Lintas
551.43	Alur dan kolam Pelabuhan
551.44	Trayek
551.45	Sarana/ Kapal
551.46	Pelabuhan
551.47	Terminal
551.48	Kecelakaan
551.49	Perizinan
551.5	Perkereta-Apian
551.51	Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
551.52	Prasarana (Jalan/ Jembatan)
551.53	Trayek
551.54	Angkutan Penumpang
551.55	Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/ Perbaikan
551.59	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran Charter/ Wisata Turis
552.15	Pelayaran khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
552.2	Perkapalan - Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang

552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/ Patroli/ Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Pontol/ Tongkang
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.31	Tanah/ Lokasi
552.32	Alur Layar
552.33	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan/ Gedung/ Gudang
552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan/ Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan Di laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	Pos
552.62	Minyak
552.63	Log
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan pokok
552.66	Peti Kemas/ EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69	Bongkar Muat
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu-rambu/ Mercusuar
552.72	Kelayakan Kapal/ Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan/ Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.76	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang/ Kapal
552.82	Keelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana Prasarana
552.84	Pembajakan/ Penyelundupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perizinan
552.91	Ijin Berlayar

552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk kapal
552.94	Ijin Pembukaan kantor cabang
552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.11	Penerbitan Domestik
553.12	Penerbangan Luar Negeri
553.13	Penerbangan Haji
553.14	Penerbangan Charter/ Non Reguler
553.15	Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah/ Lokasi
553.22	Landasan
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang
553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan/ Gedung
553.27	Perlengkapan
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	Pos
553.42	Muatan Dalam Negeri
553.43	Muatan Luar Negeri
553.44	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelayakan
553.51	Kelayakan Pesawat Udara
553.52	Kelayakan Peralatan Penunjang
553.53	Kelayakan Personil/ Awak Kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu-Rambu
553.62	Perakitan/ Kalibrasi
553.63	Fasilitas Keselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan/ Gangguan
553.71	Kecelakaan Penumpang
553.72	Kecelakaan Barang
553.73	Gangguan Sarana/ Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi
553.82	Asosiasi
553.83	Satpam (Satuan Pengamanan)
553.84	Rally Udara/ Lomba

553.9	Perizinan
553.91	Izin terbang/ Flight Approval
553.92	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan/ EMPU
553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	Pos
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan Fasilitas
554.12	Rehabilitasi/ Perawatan
554.13	Bina Usaha/ Pengawasan/ Penerbitan
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah/ Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa Pos
554.22	Jasa Titipan
554.23	Jasa giro
554.24	Benda Pos/ Perangko
554.25	Sampul Peringatan
554.26	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perizinan
554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos/ Titipan
554.32	Pembukaan Agen/ Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyelundupan
555	Teknologi Informasi
555.1	Kebijakan
555.2	Peralatan
555.21	Telepon
555.22	Internet/USO
555.23	Telegram, Telex/SBB, Faximile
555.24	Satelit, Stasiun Bumi
555.25	Radio Komunikasi
555.3	Sistem
555.4	Pembinaan/Penerbitan
555.5	Perizinan
556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556111	Usaha Jasa Biro perjalanan wisata
556.112	Restoran dan Rumah Makan
556.12	Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik wisata
556.14	Usaha Sarana Pariwisata
556141	Izin Pariwisata
556142	Izin Usaha Pariwisata
556143	Izin Usaha Jasa Pariwisata

556144	Izin Pengusahaan obyek dan daya Tarik wisata
556145	Izin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556151	Wisatawan Nusantara
556152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556161	Dalam Negeri
556162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
556.3	Travel Service
556.31	Pramu wisata
556.32	Biro Perjalanan/ Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Objek dan Daya Tarik Wisata
556411	Ciptaan Tuhan
556412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi/ Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah/ Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga Kepariwisataaan
557	Meteorologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Peneropongan Bintang
558	-
559	-
560	TENAGA KERJA
560.1	Data Permintaan TKI/ TKW Dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI/ TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI/ TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/ TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI/ TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/ TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI/ TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Pasport
560.52	Perjanjian Kerja TKI/ TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/ TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/ TKW Ke Luar Negeri



560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/ TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/ TKW karena kontraknya habis
560.72	Pemulangan TKI/ TKW Ilegal
560.73	TKI/ TKW terkena kasus pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional
561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minimum
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk di dalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance
561.6	Pembayaran Gaji/ Upah TKI/ TKW
562	Penempatan Tenaga Kerja
562.1	Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/ Perluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.31	Izin Pendirian Lembaga Penyalur Naker antara Kerja lokal/ daerah dan antar kerja Negara (AKAN)
562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/ BKS/ BKK)
562.33	Pencabutan Izin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/ BKK/ BKS)
563	Pelatihan kerja
563.1	Pendidikan Pekerja
563.11	Pendidikan dan Latihan Kerja
563.12	Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
563.13	Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)
563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.21	Tempat Pelatihan (BLK)
563.22	Instruktur/Pelatihan
563.23	Modul/ Silabus dan Bahan Praktek
563.24	Kurikulum dan Metode Pangajaran
563.25	Sertifikat
563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
564	Tenaga Sukarela
564.1	Butsi
564.2	Padat Karya
565	Perselisihan Pekerja
565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.11	Pengaduan Perkara Pekerja/NAKER
565.12	Pemeriksaan Perkara Pekerja/NAKER
565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja/NAKER
565.14	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
565.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
565.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D/ P4P)
565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (P4P/ P4D)
565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (P4P/ P4D)
565.2	Pemogokan/ Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566	Keselamatan Kerja

566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
566.5	Pelatihan/ Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkas
566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/ angkut)
566.82	Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (ketel Uap)
566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
566.84	Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan
566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Izin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (sip malam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK Sepihak
567.2	PHK Masal
567.3	Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK
567.4	Izin Melakukan PHK
567.5	Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian uang tunggu bagi Pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian uang pesangon bagi Pekerja yang di PHK
568	Kesejahteraan Buruh
568.1	Bantuan Kredit/ Bantuan Modal Kerja bagi Naker
568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olahraga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/ Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570	PENANAMAN MODAL
570.1	Penanaman Modal Dalam Negeri
570.2	Penanaman Modal Asing
571	Modal Patungan (joint venture)/ Penyertaan Modal
572	Pasar uang dan Modal
573	Saham
574	-
575	-

576	-
577	-
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Bank Jateng
584.2	BKK, BPR BKK, Bank Pasar
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/ Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggung
586	Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan data, peta dan publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Pertikelir
592.3	Bagi Hasil
592.31	Penetapan Imbangan Gadai Tanah
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.33	Sengketa Perjanjian bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah

592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-Hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah untuk tanaman tertentu : Tebu, Tembakau Rosela, Corchorus
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593311	Warga Negara Indonesia
593312	Warga Negara Asing
593.32	Badan Hukum
593321	Badan Hukum Indonesia
593322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.33	Tanah Gedung-Gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda - PBK No 5/ 56
593.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4/ 1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (Lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/ Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No 6/ 1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuat Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform

595.3	Pengurusan hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	-
602	-
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi profil (konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Aluminium Profil
604.4	Bahan-bahan Perlindungan dan Pengawetan (cat, tech oil, pengawet, kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
604.7	Bahan Penutup Atap
604.8	Alat-Alat Penggantung dan Pengunci
604.9	Bahan-bahan Bangunan Lainnya
605	Instalasi
605.1	Instalasi bangunan
605.2	Instalasi Listrik
605.3	Instalasi Air/ Sanitasi
605.4	Instalasi Pengatur Udara
605.5	Instalasi akustik
605.6	Instalasi cahaya/ penerangan
606	Konstruksi pencegahan
606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
606.2	Terhadap Gempa
606.3	Terhadap angin/ udara/ panas
606.4	Terhadap Kegaduhan
606.5	Terhadap gas/ eksplosiv
606.6	Terhadap serangga
606.7	Terhadap radiasi atom
607	-
608	-
609	-
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpahan Banjir
611.14	Menara Pengambilan
611.15	Pembangunan Dermaga
611.2	Bangunan Pengambilan
611.21	Bendungan

611.22	Bendungan dengan pintu bilas
611.23	Bendung dengan pompa
611.24	Pengambilan bebas
611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
611.26	Sumur dengan pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	Silf Ekstretor
611.29	Escope chenel
611.3	Bangunan pembawa
611.31	Saluran
611311	Saluran Induk
611.312	Saluran Sekunder
611.313	Suplesi
611.314	Tersier
611.315	Saluran Kwarter
611.316	Saluran Pasangan
611.317	Saluran tertutup/ terowongan
611.32	Bangunan
611.321	Bangunan bagi
611.322	Bangunan bagi dan sadap
611.323	Bangunan sadap
611.324	Bangunan chek
611.325	Bangunan terjun
611.33	Bax tersier
611.34	Got miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong
611.38	Pelimpahan samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.41	Saluran
611.411	Saluran Pembuangan Induk
611.412	Saluran Pembuang Sekunder
611.413	Saluran Pembuang Tersier
611.42	Bangunan
611.421	Bangunan Out Let
611.422	Bangunan Terjun
611.423	Bangunan penahan banjir
611.43	Gorong-gorong pembuang
611.44	Talang Pembuang
611.45	Sypon pembuang
611.5	Bangunan lainnya
611.51	Jalan
611.511	Jalan Inspeksi
611.512	Jalan Logistik
611.52	Jembatan
611.521	Jembatan inspeksi
611.522	Jembatan hewan
611.53	Tangga cuci
611.54	Kubangan kerbau
611.55	Waduk lapangan
611.56	Bangunan penunjang

611.57	Jaringan telepon
611.58	Stasiun Argo
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612	Polder
612.1	Tanggul keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan penutup sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran Muka
612.212	Saluran Pembawa Induk
612.213	Saluran Pembawa Sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pembuangan
612.22	Bangunan Bagi :
612.221	Gorong-gorong
612.222	Syphon
612.3	Bangunan Pembuangan
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluran Pembawa Induk
612.322	Saluran Pembawa Sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
613.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan Lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang surut
613.1	Bangunan pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	Bangunan Pembuangan
613.21	Saluran Pembawa Induk
613.22	Saluran Pembawa Sekunder
613.23	Saluran Pembawa Tersier
613.24	Saluran Penyimpanan Air
613.25	Bangunan Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka

613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Chek Dam
614.18	Sypon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan lainnya
616	Air Permukaan (Danau,Waduk,Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan lainnya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan Kota
621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah



621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan tanah (earth work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong-gorong (culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah samping
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
621.91	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok ROW (Sempadan)
621.96	Rel Pengaman
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan sementara
622.15	Jembatan sementara
622.16	Kantor/ gedung proyek
622.17	Barak kerja
622.18	Laboratorium lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (earth work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavemen)
622.31	Lapis pondasi bawah
622.32	Lapis pondasi
622.33	Lapis permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit

622.42	Gorong-gorong (culver)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu Penerangan
622.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
622.84	patok-patok KM
622.85	Patok-patok ROW (sempadan)
622.86	Rel Pengaman
622.87	Pagar
622.88	Turap Penahan
622.89	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Daerah Penguasaan
623.2	Badan Jalan
623.3	Perkerasan (Lapis Pondasi, Lapis Permukaan)
623.4	Drainase (Gorong-gorong, Parit)
623.5	Median
623.6	Daerah samping
623.7	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan (Rambu-rambu)
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan Pada Jalan Kota/Kabupaten
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara
631.21	Jalan Sementara
631.22	Jembatan Sementara
631.23	Kantor Proyek
631.24	Gedung Proyek
631.25	Barang Kerja
631.26	Laboratorium lapangan

631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian Tanah
631.32	Timbunan Tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi Kepala Jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi Angker
631.5	Bangunan Bawah
631.51	Kepala Jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan organ/ trottoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan Pengaman
631.71	Turap/ penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupute
631.76	Krip
631.8	Bangunan Pelengkap
631.81	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok pengaman
631.83	Patok ROW (sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Medium
632	Jembatan Pada Jalan Provinsi
632.1	Daerah penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor proyek
632.24	Gedung proyek
632.25	Barak Kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31	Galian tanah

632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi Kepala Jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi Angker
632.5	Bangunan Bawah
632.51	Kepala Jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan Orang/ trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang Air
632.7	Bangunan Pengaman
632.71	Turap/ penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan Pelengkap
632.81	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok Pengamanan
632.83	Patok ROW (sempadan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Medium
633	Jembatan Pada Jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan)
633.2	Bangunan Sementara (Gudang, Proyek, Kantor Proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan Bawah
633.5	Bangunan (Gelagar, Lantai, Sandaran, Perkerasan)
633.6	Bangunan Pengamanan (Brojong strek dam, Krib)
633.7	Bangunan Pelengkap dan Pengaman (rambu-rambu)
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-
639	-
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara

641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-Kanak
642.2	SD & Sekolah Tinggi
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung Parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung Telkom
645.5	Terminal Angkutan Udara
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti/ Sederhana
648.12	Sedang/ Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah contoh
648.3	Real estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Di atas tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan Beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	Atap
649.4	Lantai/ langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu/ Jendela
649.51	Pintu hermonik
649.52	Pintu biasa

649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah perdagangan/ pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (site & survey)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (Home Industri)
655	Daerah Rekreasi (open Spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Sport & Playing Fields
655.3	Open Spase
656	Transportasi
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assinering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengering Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpul
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduan
658.5	Kebersihan Kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah

660.34	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan Lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber Daya Alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengembangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
668	-
669	-
670	KETENAGAAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Perizinan
671.12	Rekomendasi
671.13	Pembinaan dan Pengawasan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan Non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG – Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.24	PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi Tenaga Listrik
671.31	Gardu Induk/ Gardu Penghubung/ Gardu Trafo
671.32	Saluran Udara Tenaga Tinggi
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap

679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
681	-
682	-
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (Screen)
691.5	Pintu Air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup Penguras (Blow oof)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Sypon
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir di bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Sypon
694.6	Hydran
694.61	Hydran Umum
694.62	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (Air Relief)
694.72	Katup Pelepas (Blow off)
694.8	Bak Pelepas Tekanan (presseur reducing valve)



695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
700.1	Kebijakan dan Program Pengawasan
700.2	Pengawasan Perencanaan Pengadaan/ proyek
701	Pengawasan Inventarisasi Asset
702	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
704	Pengawasan Penelitian/Riset
705	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertanahan/BPN
707	-
708	-
709	-
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan Pemerintahan Provinsi
712	Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai termasuk pendanaan Partai, atribut Partai,dll
722	Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud hankam
723	Pengawasan Organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, Profesi, Wanita, Buruh/Tani, dan Kepemudaan
722	Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
724	-
725	-
723	-
726	-
727	-
728	-
729	-
730	BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR
733	-
734	-
735	-
736	-
737	-
738	-
739	-
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
745	Pengawasan SARA (suku agama ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan Media Massa dan Penyiaran

749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Kehutanan
754	Pengawasan Pertambangan/ESDM
755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ket transmigrasian
757	Pengawasan PMDN/PMA
758	Pengawasan Perbankan/ Moneter
759	Pengawasan Kelautan dan Perikanan
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Penyimpangan Pejabat Publik
772	-
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
783	Keanggotaan PNS dalam Parpol
784	Penyimpangan Pejabat/PNS
785	Persengketaan PNS
786	-
787	-
788	-
789	-
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran
792	Pengawasan Akuntansi
793	Pengawasan Perbendaharaan
794	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
795	Pengawasan Pendapatan
796	-
797	-
798	-
799	-
800	KEPEGAWAIAN Termasuk Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan

800.2	Penelitian
800.3	Statistik
801	-
802	-
803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	PENGADAAN Meliputi Lamaran,Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman Tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
814	-
815	-
816	-
817	-
818	-
819	-
820	MUTASI
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.2	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.21	Eselon I
821.22	Eselon 2
821.23	Eselon 3
821.24	Eselon 4
821.3	Pengangkatan dalam jabatan Fungsional, Pemberhentian sementara, Pengangkatan kembali, pengangkatan Kembali,Pernyataan menduduki jabatan,Sumpah Janji
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III

823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan/ Pelimpahan/ Perbantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
825	Datasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
826.1	Dalam Negeri
826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
826.5	Ijin Belajar
827	Wajib Militer
828	-
829	-
830	KEDUDUKAN
831	Peninjauan Masa Kerja
832	Penyesuaian Pangkat/ Gaji
832.1	PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III
832.4	PNS Golongan IV
833	Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)
834	Penghargaan Lainnya
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
841	Tunjangan
841.1	Struktural dan Fungsional
841.2	Kehormatan
841.3	Dana Kematian (Uang Muka)
841.4	Tambahan Penghasilan
841.5	Tunjangan Cacat
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik, Klinik Konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Bencana
845	Perumahan PNS
846	Dispensasi
850	CUTI
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Bersalin
855	Cuti karena Alasan penting
856	Cuti diLuar Tanggungan Negara
860	PENILAIAN

861	Penghargaan
861.1	Bintang/Satyalencana Karya Satya
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
861.4	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Ringan
862.2	Sedang
862.3	Berat
863	Konduite/ DP3
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
865	Penilaian Kinerja
865.1	Struktural
865.2	Fungsional
866	Rehabilitasi
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	Bezetting/ Daftar Urut kepegawaian
873	Registrasi,Sistem Informasi kepegawaian
873.1	NIP (Nomor Induk Pegawai)
873.2	KARPEG (Kartu Pegawai)
873.3	Legitimasi/ tanda pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU/ KARIS (Kartu Suami/Kartu Istri)
874	Legitimasi/ tanda pengenal
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
875	Kewenangan mutasi kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenang
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Korps Kepegawaian
877	-
878	-
879	-
880	PEMBERHENTIAN
881	Atas Permintaan Sendiri termasuk Pengunduran diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
882.2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
882.3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
882.4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
882.5	Pensiun Janda/Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan Lain, diantaranya keuzuran jasmani
885	Tidak Dengan Hormat

886	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
887	Tali Asih Pensiun
888	-
889	-
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
890.1	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-Kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan/ OL, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana Pendidikan
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
903	APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan SKPD/PPKD
912	Keputusan Gubernur tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
913	DPA/DPPA/DPAL-SKPD/PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
914	Anggaran Kas
915	Surat Penyediaan Dana (SPD)
916	-
917	-
918	-

919	-
920	AKUNTANSI
921	Laporan-Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
930	PERBENDAHARAAN
931	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
932	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
933	Daftar Penguji SP2D
934	-
935	-
936	-
937	-
938	-
939	-
940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
941	Bintek-Bintek/ Kursus yang Berkaitan dengan Keuangan
950	PENGELOLAAN KAS DAERAH
951	Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPH 21 dari gaji
952	Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah
953	Daftar Pemotongan dan Penyetoran pajak (PPN/ PPH) dari CV, PT, atau Instansi
954	Surat Tanda Setoran (STS)
955	Laporan Realisasi Daerah
955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
956	Rekonsiliasi
956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
956.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
957	Laporan Mutasi Penepatan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
959	-
960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan perbendaharaan
963	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
965	Edaran-Edaran
966	-
967	-
968	-
969	-
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam/ Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air

973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi Bidang Seni Budaya Dan Pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk Pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian Dan Peternakan (termasuk pemotongan hewan)
974.5	Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir, dll)
974.6	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
974.7	Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
974.8	Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas air
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP - TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK



979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan Dari Dana Bergulir/ Revolving
979.55	Kerjasama dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri)
979.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58	Setoran TP - TGR
979.59	Penerimaan lainnya dari Setda/ Dinas-dinas
980	-
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	-
991	-
992	-
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID